

## Fraksi Golkar Menerima Raperda Tahun 2023 Layak untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Anton Atong Sugandhi - [PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM](http://PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM)

Jul 2, 2024 - 13:32





PANGANDARAN JAWA BARAT - Setelah mendengarkan penjelasan bupati pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahiim, kami Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum ini menerima dan bersedia untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian dikatakan Wiwi Widaningsih saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar atas penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (01/07/2024).

Disampaikannya bahwa, sesuai ketentuan pasal 320 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 194 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa APBD kabupaten pangandaran tahun 2023 telah diaudit oleh BPK-RI perwakilan jawa barat dengan opini "Wajar dengan Pengecualian" (WDP), tentu saja ini harus jadi catatan penting bagi kita dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan

daerah dan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Saudara pimpinan dan peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,  
sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD memandang bahwa penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat penting untuk mendapatkan perhatian secara proporsional. hal itu, dimaksudkan agar keberhasilan yang telah diraih untuk tetap dipertahankan, sementara kekurangannya dapat diperbaiki guna menyempurnakan hasil yang telah direncanakan "katanya".

Menurut Wiwi, setelah mendengarkan penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahiim, kami Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum ini menerima dan bersedia untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Saudara pimpinan dan peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,  
demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023.

Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan hadirin atas kepercayaan kepada fraksi partai golongan karya untuk memberikan kesempatan dalam rapat ini. Mohon maaf apabila didalam penyampaian terdapat hal-hal yang tidak berkenan "ujarnya".

Parigi, 01 juli 2024  
Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pangandaran

Ade Ruminah, S.H ( ketua) Wiwi Widaningsih ( sekretaris).  
(Anton AS)